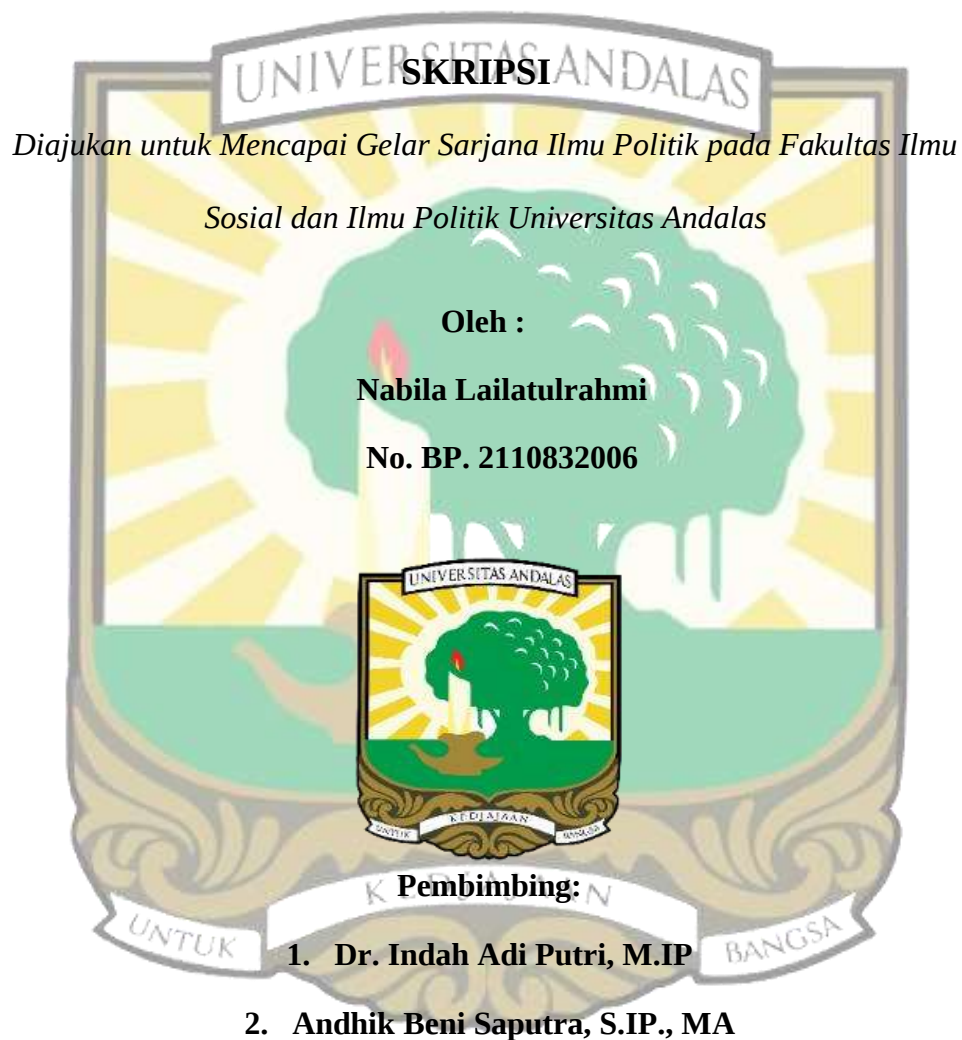


**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH
KABUPATEN AGAM NOMOR 2 TAHUN 2016 TENTANG
PENANGGULANGAN BENCANA DI
KECAMATAN SUNGAI PUA**



**DEPARTEMEN ILMU POLITIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2025**

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi tingginya tingkat kerawanan bencana alam di Kecamatan Sungai Pua, berupa erupsi Gunung Marapi dan banjir lahar dingin yang berdampak signifikan terhadap kehidupan masyarakat, sehingga diperlukan implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 2 Tahun 2016 tentang Penanggulangan Bencana. Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi peraturan tersebut di Kecamatan Sungai Pua, khususnya ketentuan Pasal 28 hingga 38. Teori yang digunakan pada penelitian ini yaitu teori George C. Edwards III tentang implementasi kebijakan, yang terdiri dari 4 indikator utama: komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Teknik pengumpulan datanya berupa data sekunder, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Agam telah melakukan sejumlah upaya dalam pelaksanaan kebijakan penanggulangan bencana, yaitu (1) memperkuat komunikasi lintas sektor melalui rapat koordinasi, (2) menyediakan hunian tetap bagi masyarakat terdampak, (3) memperbaiki sarana dan prasarana yang rusak. Akan tetapi, terdapat persoalan lain yang menyebabkan implementasi kebijakan penanggulangan bencana di Kecamatan Sungai Pua belum berjalan optimal, berupa kurangnya komunikasi dengan masyarakat terdampak terkait program relokasi, pemanfaatan anggaran yang tidak optimal dalam mendukung pemulihan ekonomi masyarakat, lemahnya pendataan masyarakat terdampak, serta kurang efektifnya koordinasi antar pelaksana dalam memenuhi kebutuhan masyarakat terdampak.

Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, Penanggulangan Bencana, Pemerintah Daerah.



ABSTRACT

The research is motivated by the high level of vulnerability to natural disasters in Sungai Pua District, in the form of Mount Marapi eruptions and cold lava floods that have had a significant impact on people's lives, so that the implementation of Agam Regency Regional Regulation Number 2 of 2016 concerning Disaster Management is necessary. This research aims to analyze the implementation of this regulation in Sungai Pua District, specifically the provisions of Articles 28 to 38. The theory used in this research is George C. Edwards III theory on policy implementation, which consists of 4 main indicators: communication, resources, disposition, and bureaucratic structure. This research uses a qualitative approach with a case study method. Data collection techniques include secondary data, interviews, and documentation. The results of the research indicate that the Agam Regency Government has made a number of efforts in implementing disaster management policies, namely (1) strengthening cross-sector communication through coordination meetings, (2) providing permanent housing for affected communities, (3) repairing damaged facilities and infrastructure. However, there are other problems that cause the implementation of disaster management policies in Sungai Pua District to not run optimally in the form of a lack of communication with affected communities regarding the relocation program, suboptimal use of the budget in supporting community economic recovery, weak data collection on affected communities, and ineffective coordination between implementers in meeting the needs of affected communities.

Keywords: Policy Implementation, Disaster Management, Local Government.

